

REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM

(Studi Kasus Perubahan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Tahun 2016 - 2018)

Galuh Anjasmara (20140520100)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: galuh.anjasmara@gmail.com

Birokrasi merupakan sebuah unsur dalam pemerintahan yang digunakan untuk menjalankan sebuah pembangunan yang ada disuatu daerah kepemimpinan atau pemerintahan. Dalam sejarahnya, birokrasi ini banyak sekali perubahan-perubahan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi dengan melakukan reformasi birokrasi ini, Reformasi birokrasi ini merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan seperti yang terjadi pada perubahan kelembagaan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kota Batam (DPM-PTSP).

Penelitian yang digunakan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok dengan cara mengumpulkan data primer dan juga sekunder. teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan wawancara terhadap stakeholder terkait dan juga melakukan dokumentasi di objek penelitian yang ada, dengan ini peneliti dapat melakukan langkah-langkah selanjutnya berupa analisis data. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori-teori yang biasa digunakan dalam penelitian yaitu teori organisasi perangkat daerah, reformasi birokrasi, kelembagaan dan juga faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi, yaitu; faktor kekuasaan, faktor sumber daya manusia, faktor anggaran dan juga faktor kebijakan. Dari seluruh faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap reformasi birokrasi seperti penggabungan bidang yang telah ada, penyusunan ulang tupoksi dan pembentukan lembaga menjadi sebuah dinas. Faktor-faktor ini saling berkaitan antara satu sama lain dalam mempengaruhi reformasi birokrasi. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana bentuk dari hasil reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kota Batam.

Perubahan Kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam telah menghasilkan perubahan yang baik berupa perbaikan kualitas kinerja dan SOP pelayanan yang ada, namun untuk selanjutnya perubahan ini ada baiknya dipersiapkan tidak hanya dari pelayanan nya saja namun SDM yang memumpuni agar dapat memenuhi aturan ideal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, DPM-PTSP

A. PENDAHULUAN

Birokrasi adalah sebuah unsur-unsur pemerintah yang digunakan untuk mensukseskan pembangunan. Dalam sejarahnya banyak sekali perubahan-perubahan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi dengan melakukan reformasi birokrasi. Menurut Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi itu sendiri merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.

Eko & Teguh (2012) berpendapat bahwa banyak sekali permasalahan ataupun hambatan yang membuat tidak berjalannya suatu sistim dalam pemerintahan. Hal tersebut dimungkinkan pula diperlukan untuk diperbaiki dalam artian ditata ulang demi mencapai sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan maksud sebuah langkah strategis untuk membangun sebuah aparatur negara yang berkerja optimal serta memiliki daya guna yang maksimal demi tercapainya sebuah tugas pemerintah dalam membangun daerah maupun nasional maka diadakannya reformasi birokrasi.

Fachri (2013) juga mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa reformasi birokrasi sangat perlu dilakukan. Pertama, adanya ketidakpercayaan oleh masyarakat atas kinerja pemerintah tentang pelayanan publik sehingga perlu adanya sebuah peningkatan secara signifikan. Kedua, masih adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela. Ketiga, minimnya kinerja seluruh pelayanan publik sehingga belum terpenuhinya seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keempat, kurangnya pemerintah dalam mengefisiensikan anggaran untuk terciptanya sebuah keefektifitasan. Kelima, adanya anggapan bahwa pemerintah belum melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabel secara optimal, sehingga ketidakjelasan informasi terkait pelayanan pemerintah masih dapat ditemukan oleh masyarakat luas.

Keenam, kurangnya kejujuran, kedisiplinan, rasa bertanggung jawab, kesabaran, ketekunan, kreatifitas semangat kerja, wawasan, loyalitas dan dedikasi bagi pemberi pelayanan. Dan Ketujuh, berubahnya dan berkembangnya teknologi informasi serta adanya perubahan lingkungan global. Maka itu untuk terciptanya pemerintahan yang baik secara terus menerus dan berkesinambungan, reformasi birokrasi sangat dibutuhkan.

Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Kota Batam menerbitkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja yang di dalamnya menjelaskan bahwasannya ada pembaharuan nomenklatur menjadi Dinas yaitu yang sebelumnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi sebuah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Aturan tersebut berdasarkan dari pedoman Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 yang dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwasannya "pembentukan Organisasi Perangkat Daerah atau yang disingkat OPD ditetapkan dengan peraturan daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 itu pula dijelaskan dalam Bab 2 ayat (2) bahwa "*pembentukan organisasi perangkat daerah meliputi susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah*" dan dilanjut ayat (3) *Terkait penyusunan tugas, fungsi dan tata kerja diatur selanjutnya dengan peraturan gubernur/bupati/walikota*".

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk melanjutkan penelitian ke taraf pengetahuan ilmiah yang mengumpulkan fakt-fakta atau prinsip-prinsip untuk mendapat kejelasan suatu masalah. Penelitian yang digunakan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok. Proses penelitian kualitatif ini merupakan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan

data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data (Creswell 2010)

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang beralamat di Mal Pelayanan Publik dan terletak di Jalan daeng Kamboja, Gedung Sumatera Convention Center, lantai dasar, Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464, nomor telepon : (0778) 473 228, Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kota Batam yang beralamat di Jalan Engku Putri No.1 Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464, nomor telepon : +62 778 462164, Sekretariat DPRD Kota Batam yang beralamat di Jalan Engku Putri Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426, nomor telepon (0778) 462229 dan tempat atau instansi yang terkait dengan perubahan kelembagaan yang terjadi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Pada Tahun 2016.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah Kota Batam telah melakukan reformasi birokrasi yang salah satunya berada di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Endy Fuziman berpendapat saat wawancara bahwa dengan adanya reformasi birokrasi yang telah terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dapat memaksimalkan pelayanan ataupun kinerja hingga segala tantangan bisa dihadapi.

1. Perubahan Nomenklatur

Upsizing merupakan pembesaran struktur atau penambahan bidang untuk menunjang kinerja (Bernadin dan Russel dalam Farid dkk, 2015). Penggemukan atau pembesaran suatu lembaga tergantung dengan pendekatan yang digunakan sehingga pada besarannya akan sangat terlihat. Struktur organisasi pada suatu lembaga juga dapat dijadikan sebagai acuan

untuk mengetahui adanya penggemukan atau perampingan lembaga. Salah satunya yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

Tabel 3.1

Verifikasi Tipologi Kelembagaan Dinas Penanaman Modal Kota Batam

Indikator	Nilai	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.031.121	100
Luas Wilayah (KM2)	4.264	50
Jumlah APBD	2.378.621.224.007	50
Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi	6	20
Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun	15.000	300
Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi	12.000	400
Total Skor		920
Pengali		1.1
Total		1012

Sumber: (Diolah,2019)

Verifikasi tipologi dinas penanaman modal diatas merupakan hasil dari perhitungan penentuan bentuk tipologi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 dengan hasil total sebanyak 1012 untuk bidang penanaman modal di Pemerintah Kota Batam. Hasil dari penghitungan besaran diatas ditetapkan di dalam dokumen “Verifikasi Tipologi Kelembagaan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Batam”.

Dokumen diatas adalah bukti bahwa telah terjadi sebuah pembesaran yang terjadi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi sebuah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipologi yang sangat besar yaitu tipologi A. Hal ini ditentukan sesuai dalam instrumen yang ada dalam permendagri bahwa apabila hasil dari verifikasi instrumen atau skor yang telah dihitung melebihi angka 800 maka bidang tersebut berbentuk tipologi A, dalam hal ini bidang penanaman modal kota batam mendapatkan skor total sebesar 1012 yang didapat dari hasil skor awal sebesar 920 lalu dikalikan dengan bilangan pengali sebesar 1.1.

2. Penyusunan Kembali Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kota Batam

Dalam Peraturan Walikota Kota Batam no 56 Tahun 2016 menjelaskan hal terkait struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ini. Di dalamnya menjelaskan tidak adanya perubahan di dalam perubahan nomenklatur dari badan menjadi dinas pada bidang penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A saat ini memiliki 3 subbag dan 4 bidang hal ini sesuai dalam Peraturan Walikota Kota Batam no 56 Tahun 2016, diantaranya; ada (1) sub bagian program, (2) sub bagian keuangan dan (3) sub bagian umum dan kepegawaian. Sedangkan bidang yang dimiliki; (1) bidang promosi, data dan informasi penanaman modal, (2) bidang pengawasan, pengendalian dan pengaduan penanaman modal & perizinan, (4) bidang perizinan ekonomi dan sosial, dan yang terakhir bidang perizinan pembangunan dan lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas Bernadin dan Russel (2017) menjelaskan *reorganization* merupakan salah satu dari bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan dengan cara penyusunan kembali tugas pokok dan fungsi dari suatu organisasi. Perubahan kelembagaan yang terjadi di bidang penanaman modal dan PTSP yang saat ini menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, bahwa saat ini tidak adanya penyusunan kembali terhadap tugas pokok dan fungsi sebab penyusunan kembali (*Reorganization*) tugas pokok dan fungsi yang menjadi salah satu hal dalam reformasi birokrasi atau perubahan

kelembagaan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A dalam realitanya tidak ada yang berubah dari sebelumnya. Segala struktur organisasi dan maupun bentuk komando yang ada di dinas ini semuanya masih sama saja. Penjelasan yang dijelaskan Bapak Endy Fauzimar S.IP selaku sekretaris beranggapan bahwa adanya reformasi birokrasi ini secara struktural tidak berubah sama sekali dan tidak ada penambahan ataupun pengumpulan dan juga penyusunan ulang tugas dan fungsi dinas tersebut.

3. Penggabungan Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu di Kota Batam

Bidang penanaman modal dan PTSP di Kota Batam yang saat ini dinaungi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A memiliki struktur organisasi yang sama ketika sebelumnya bernomenklatur atau berbentuk sebuah badan. Bidang-bidang yang terdapat dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ini mengikuti struktur pada badan yang sebelumnya. Struktur yang terbentuk saat ini terjadi penggabungan beberapa tugas yang. Penggabungan bidang-bidang ini dilakukan agar tidak terjadinya kebutuhan anggaran yang banyak karena untuk pemecahan bidang-bidang, tentunya membutuhkan kesiapan dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi dan hal ini secara langsung membutuhkan anggaran yang lebih untuk membiayai pejabat atau SDM yang ada. Penggabungan bidang-bidang ini telah terjadi sebelumnya ketika bidang penanaman modal masih berbentuk sebuah badan. Bidang-bidang yang dikelompokkan tersebut dilakukan untuk mengefisiensikan anggaran yang ada di daerah karena jika bidang-bidang di penanaman modal dipecah sesuai aturan di dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 yang menjelaskan idealnya untuk Dinas Penanaman Modal yang memiliki Tipologi A harus memiliki 1 sekretaris yang mengatasi 3 subbag dan memiliki 8 bidang maka akan sangat memberatkan.

Pengaruh Perubahan Kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kota Batam

Dibawah ini menjelaskan seluruh faktor yang disebut mempengaruhi perubahan kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.

1. Faktor Kekuasaan

Pemerintah Kota Batam yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Rudi S.E selaku pemegang kekuasaan sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan yang ada, hal ini dapat dilihat dari komitmen beliau untuk membentuk sekretariat bidang ini menjadi 2 sekretariat untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah untuk masyarakat yang ingin melakukan atau menggunakan fasilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ini. Kekuasaan pemerintah daerah ini sangat berpengaruh atas terjadinya reformasi birokrasi atau perubahan kelembagaan karena berubahnya suatu lembaga ini dipegang penuh oleh pemerintah daerah yaitu dipegang penuh oleh Walikota Kota Batam yaitu Bapak Muhammad Rudi S.E yang dalam hal ini yang menentukan arah kebijakan yang berlaku di daerah pemerintahan Kota Batam. Pemerintah pusat juga merupakan faktor atas terjadinya perubahan, Pemerintah Pusat seperti yang dijelaskan diatas menggambarkan bahwa kepekaan kekuasaan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sangat berpengaruh dalam reformasi birokrasi yang dilakukan diseluruh Indonesia yang berdampak hingga ke daerah seperti yang terjadi di kota Batam, kekuasaan pemerintah pusat menginginkan adanya pembenahan di sektor birokrasi dengan cara melakukan reformasi agar terciptanya birokrasi yang mampu melayani masyarakat dengan maksimal.

2. Faktor SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dikatakan menjadi faktor terjadinya reformasi suatu organisasi. SDM adalah aspek atau unsur yang disediakan untuk menjalankan sebuah

organisasi dalam jangka waktu tertentu dan biasanya ditentukan dalam satuan uang ataupun barang dan jasa, SDM merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi karena SDM yang mengimplementasikan kebijakan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia yang merupakan aspek atau unsur yang disediakan untuk menjalankan atau mengimplementasikan sebuah organisasi ini dalam reformasi birokrasi bidang penanaman modal dan PTSP yang saat ini diurus oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A sangat berpengaruh dengan adanya penambahan struktur yang tentunya memerlukan SDM yang memumpuni. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batam melakukan reformasi birokrasi yang mengharapkan ada pembesaran di dinas namun ada beberapa aspek yang menghambat seperti kesiapan SDM dari segi kualitas dan juga jumlahnya. Aspek SDM menjadi salah satu faktor yang berpengaruh untuk terjadinya reformasi birokrasi ini. Faktor SDM ini yang menjadi hal penentu apakah bidang dalam sebuah organisasi bisa disesuaikan dengan aturan yang ada sebab jika dilakukan penambahan tentunya ada yang perlu diperhatikan yaitu; kesiapan SDM dari segi kualitas maupun jumlah dan juga anggaran APBD.

3. Faktor Anggaran (APBD)

Nafarin (2017) berpendapat bahwa ada faktor anggaran yang mengakibatkan terjadinya reformasi suatu organisasi. Anggaran adalah hal yang dibuat untuk menjalankan sebuah organisasi untuk jangka waktu tertentu dan biasanya ditentukan dalam satuan uang ataupun barang dan jasa.

Anggaran yang ditetapkan memang sangat berpengaruh dengan reformasi birokrasi yang dilakukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A karena anggaran ini yang menentukan seberapa mampu sebuah organisasi dikembangkan sesuai dengan aturan PP No 18 Tahun 2016 yaitu dengan 3 sub bagian dan 8 bidang, dan

anggaran ini juga merupakan sebagai dasar penentuan dari penambahan pegawai di untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.

Dengan itu sangat jelas bahwa anggaran ini sangat berpengaruh terhadap reformasi birokrasi atau perubahan kelembagaan yang terjadi di bidang penanaman modal dan PTSP yang ada di Kota Batam. Anggaran ini di desain sedemikian untuk menjalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A dalam jangka waktu tertentu dan biasanya ditentukan dalam satuan uang ataupun barang dan jasa yang pada akhirnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak terjadi pembesaran struktur maupun penambahan SDM nya.

4. Faktor Kebijakan

Kebijakan menjadi sebuah faktor dari terjadinya suatu reformasi birokrasi yang terjadi, hal ini dikemukakan oleh Taya (2017) bahwa kebijakan ini menentukan sebuah arah atau sebagai taktik ataupun strategi dalam menentukan arah kebijakan agar tercapainya sebuah tujuan yang di inginkan.

Dalam hal kebijakan reformasi birokrasi yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ini ada beberapa aturan yang sangat mempengaruhi hingga terjadinya perubahan nomenklatur menjadi sebuah dinas. Aturan kebijakan tersebut dijelaskan di tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Regulasi/Kebijakan terkait perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A

No.	Regulasi/Kebijakan	Tentang
1.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014	Pemerintah Daerah
2.	Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016	Perangkat Daerah
3.	Peraturan Daerah Kota Batam No 10 Tahun 2016	Pembentukan dan susunan perangkat daerah
4.	Peraturan Walikota No. 56 Tahun 2016	Struktur organisasi perangkat daerah
5,	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2016	Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Diolah (2019)

Reformasi birokrasi/perubahan nomenklatur yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang berlaku maupun itu dari pusat dan juga daerah. Seluruh kebijakan yang ada merupakan sebuah embrio dari adanya perubahan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A mulai dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang menetapkan terkait pemerintahan daerah lalu dilanjutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016

ini menjelaskan terkait bentuk sebuah lembaga pemerintah daerah yang akan dibentuk melalui penghitungan-penghitungan yang sudah ditetapkan untuk menetapkan sebuah besaran seperti yang tertera di Dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 pada Bab IV (empat) Pasal 53 ayat 2 dan 3 menjelaskan;

(2) Tipelogi dinas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- a. dinas tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
- b) dinas tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
- c) dinas tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

Setelah melalui penghitungan-penghitungan yang ada ditetapkan bentuk nya melalui Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2016 yang menetapkan bentuk dari sebuah lembaga bidang penanaman modal dan PTSP berbentuk sebuah dinas. Lalu dilanjutkan bentuk struktur organisasinya ditetapkan di dalam Peraturan Walikota Kota Batam No 56 Tahun 2016. Faktor kebijakan merupakan menjadi sebuah faktor dari terjadinya suatu reformasi birokrasi yang terjadi di bidang penanaman modal dan PTSP yang saat ini memiliki nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Hal ini jelas sangat berpengaruh karena terbentuknya sebuah lembaga yang terjadi di daerah merupakan sebuah bentuk dari implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan harus diberlakukan oleh daerah.

Dampak Perubahan Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe A Kota Batam

Fachri (2013) menjelaskan bahwa reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas kinerjanya. Dalam hal ini kinerja yang dimaksud adalah maksimalisasi pelayanan yang ada dengan menerapkan efisiensi dan efektifitas dalam pembaharuan administrasi. Reformasi birokrasi atau perubahan kelembagaan adalah sebuah penyelesaian untuk memperbaiki birokrasi demi terciptanya sebuah birokrasi yang akuntabel serta profesional dalam menjalankan kerjanya. Dengan ini Kusuma (2015) menganggap bahwa reformasi birokrasi ialah sebuah cara untuk melakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada pemerintah. Hal ini sangat perlu dilakukan agar terciptanya birokrasi yang baik serta kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah sangatlah maksimal. Dengan adanya birokrasi yang baik pegawai memiliki tuntutan untuk berkerja sesuai SOP yang ada dengan capaian – capaian kerja yang ada. Perubahan kelembagaan yang terjadi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang sebelumnya berbentuk sebuah badan dan saat ini telah menjadi sebuah dinas dengan tipologi A sangat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Perubahan kelembagaan yang terjadi di bidang penanaman modal Pemerintah Daerah Kota Batam yang saat ini dinaungi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah terjadi sebuah peningkatan, adanya sebuah perbaikan dalam bentuk kinerja pegawai dinas dan juga standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan yang membuat adanya maksimalisasi dalam pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya berupa penyediaan fasilitas gedung yang bagus namun juga dinas ini telah menanggapi perkembangan zaman yang mengharuskan untuk mengikuti teknologi berupa perizinan online yang dapat dilakukan dengan membuka websitenya yaitu *ptsp.batam.go.id*. Paham dengan menangani keluhan masyarakat, aplikasi aduan berupa “APEKESAH” pun diluncurkan untuk menangani segala aduan masyarakat agar dapat menyempurnakan segala pelayanan dan

meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kota Batam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan terkait penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi yang berada pada bidang penanaman modal Kota Batam yang sebelumnya berbentuk sebuah badan dan sekarang telah berbentuk dinas, bahwa Reformasi birokrasi merupakan hal penting dalam sebuah lembaga dan hal ini merupakan suatu kewajiban dalam birokrasi ataupun pemerintah dikarenakan untuk menghadapi perkembangan zaman (Thoha, 2017). Dalam hal ini ada 3 aspek yaitu;

Upsizing (Pembesaran), dalam hal pembesaran ini dapat disimpulkan jika pembesaran yang terjadi di bidang penanaman modal yang saat ini diurus oleh DPM-PTSP bahwasannya untuk struktur organisasi tidak adanya penambahan bidang ataupun bagian namun bidang ini mengalami perubahan dari badan menjadi dinas. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan verifikasi sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 dengan hasil 1012 yang menandakan jika mendapat skor lebih dari 800 maka sebuah bidang dibentuk menjadi tipe A.

Reorganization (Penyusunan Kembali), Pemerintah Kota Batam ketika melakukan reformasi birokrasi mengubah bidang penanaman modal menjadi sebuah dinas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadinya penyusunan kembali sebab tidak adanya pembentukan ataupun penambahan struktur yang menandakan tidak adanya pembentukan kembali tugas pokok maupun fungsi yang ada. Hal ini di indikasikan karna ada beberapa faktor yaitu sumber daya manusia (SDM), anggaran (APBD) dan juga kekuasaan pemerintah daerah yaitu Walikota Kota Batam Bapak Muhammad Rudi S.E.

Merger (Pengelompokan), pengelompokan yang terjadi di DPM-PTSP ini telah terjadi sebelumnya ketika masih terbentuk menjadi badan. Pengelompokan bidang-bidang ini

digabung dikarenakan ada indikasi dari faktor kesiapan sumber daya manusia dari segi jumlah dan kesiapan SDM yang ada, maka dengan hal ini bidang-bidang dikelompokkan. Namun pada idealnya untuk dinas bertipologi sesuai PP No. 18 tahun 2016 yaitu berjumlah 8 bidang tetapi tidak dengan hal ini DPM-PTSP memiliki 4 bidang saja.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, yaitu; 1. Faktor Kekuasaan. Faktor ini mempengaruhi perubahan badan menjadi dinas di bidang penanaman modal dan PTSP karena, dalam hal ini ada indikasi pemerintah daerah yang menginginkan bidang ini untuk berbentuk sebuah dinas namun pemerintah daerah yang dipimpin oleh Walikota Kota Batam Muhammad Rudi S.E membuat kebijakan untuk tidak memperbesar struktur organisasi yang ada karena alasan SDM dan anggaran. 2. Faktor Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan perubahan kelembagaan dari badan menjadi dinas di bidang penanaman modal dan PTSP karena kesiapan sumber daya manusia dalam bentuk jumlah maupun kualitas sangat berpengaruh dengan terjadinya penambahan struktur yang berarti pembesaran atau *upsizing*. Pemerintah Kota Batam terlihat terkendala dengan tidak adanya kesiapan SDM yang bisa menangani hal-hal untuk menduduki jabatan yang baru. 3. Faktor Anggaran, dalam hal ini APBD sangat berpengaruh terhadap reformasi birokrasi. Faktor ini yang menyebabkan tidak terjadinya penambahan bidang-bidang yang ada di bidang penanaman modal yang telah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Keterbatasan anggaran ini yang menjadi salah satu faktor karena jika ditambahkan pejabat untuk menduduki bidang-bidang yang harusnya ditambah tentunya memerlukan anggaran yang cukup. 4. Faktor Kebijakan, Reformasi birokrasi/perubahan nomenklatur yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang berlaku maupun itu dari pusat dan juga daerah. Ada beberapa aturan yang harus di

implementasikan yaitu UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016 dan Permendagri No.100 Tahun 2016 lalu dilanjutkan dengan kebijakan daerah yaitu Perda Kota Batam No.10 Tahun 2016 yang membunyikan bentuk lembaga diikuti bentuk struktur di Perwako Kota Batam 56 Tahun 2016 dan Tugas pokok dan fungsi dalam Perwaku Kota Batam No 55 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

SKRIPSI

- Akhmaddian, Suwari. (2012) *Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal di Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Bekasi)*. Skripsi. UNSOED.
- Dewangga, Aditya. (2012) *Iklim Komunikasi Organisasi Pada CV. Garlick Indotama Surabaya (Studi Deskriptif Iklim Komunikasi Organisasi Pada CV. Garlick Indotama Surabaya)*. Skripsi. UPN "V" Jatim.
- Elianda, Yunita. (2017). *Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY Tahun 2015*. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta: UMY.
- Hanafie, Haniah. (2014) *Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayah, Ahmad. (2014) *Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Pada Suku Dinas Pendidikan di Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kusuma, Reyhan. (2015) *Desain Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Studi kasus : Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta*. Skripsi Ilmu Politik dan Pemerintahan. UGM.
- Vivi, Anggraini. (2018) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kelembagaan Dinas Perizinan Menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bantul Tahun 2016*. Skripsi. UMY.
- Wirandha, Andre. (2018) *Strategi Pemerintah Kota Batam dalam Pengembangan Ekowisata Agrikultur di Perkebunan Buah Naga Zore Tahun 2016 (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam)*. Skripsi. UMY.

TESIS

Anugrah, Jacky. (2014) *Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Samarinda (Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda)*. Tesis Magister Ilmu Administrasi Negara. UNMUL

Nurbarani, Myrna. (2009) *Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta*. Tesis Magister Ilmu Politik UNDIP.

Nurdin, Nurizal. (2015) *Analisis Penerapan Reformasi Birokrasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kejaksaaan Tinggi Gorontalo (Studi Kasus Pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus)*. Tesis Magister Administrasi Publik. UT.

JURNAL

Eko dan Teguh (2012) *Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practice dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Jurnal Departemen Ilmu Administrasi. UI.

Ilhamsyah, Fachri (2013) *Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Studi terhadap Kualitas Pelayanan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.)* Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 1. UNLAM.

Jauhari, Arief. (2015) *Penerapan Good Governance Berbasis E-Governance dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh*. Jurnal Administrasi Akuntansi, Volume 4 No. 3. UNSYIAH.

Juwandi, Ronni. (2016) *Efektivitas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dalam Rangka Reformasi Birokrasi*. *Civic Education Journal* Volume 1 No. 2 Hal. 153-172. UNTIRTA.

Kurniawan, Josef. (2015) *Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 35. UNSRAT.

Nursanti, Desy. (2014) *Pengaruh budaya organisasi dan struktur organisasi terhadap kinerja karyawan PT.Kliring Penjaminan Efek Indonesia*. Jurnal Binus.

Rizka, Lailatul. (2014) *Implementasi Reformasi birokrasi Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 4 STIESIA.

Yulianti, Desi. (2015) *Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta*. Jurnal UNY.

Yusmiati, Aninda. (2012) *Analisis Reformasi Birokrasi (Studi Deskriptif Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Neara (KPPK) Surabaya I)* Jurnal Administrasi Publik UGM.

BUKU

Basrowi & Suwandi, (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

Lincoln & Guba, (1985). Metodologi Penelitian. California.

WEBSITE

<https://batam.go.id>

<https://jdih.batam.go.id>

<https://arsipskpd.batam.go.id>

<http://rb.uns.ac.id/2017/01/02/mengapa-reformasi-wajib-dilakukan-2/>

BERITA ONLINE

Mengapa Reformasi Wajib Dilakukan (<http://rb.uns.ac.id/2017/01/02/mengapa-reformasi-wajib-dilakukan-2/>) diakses pada hari Senin 13 Maret 2018 pukul 21.00 WIB.

Sejarah Penguasa Lahan Pulau Batam (<http://gowest.id/sejarah-penguasa-lahan-pulau-batam/>) diakses pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 pukul 11.18 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Batam No 10 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007

Peraturan Presiden No 91 Tahun 2017

Peraturan Walikota Batam No 55 Tahun 2016

Peraturan Walikota Batam No 56 Tahun 2016

Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Undang-Undang No 32 Tahun 2004